

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan utama yaitu mendapatkan laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Perolehan laba merupakan tujuan utama perusahaan dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan bagi pemilik dan pemegang saham serta meningkatkan nilai perusahaan, yang terlihat dari harga sahamnya. Pergerakan harga saham ini menjadi indikator penting bagi investor dalam menilai perusahaan. Semakin tinggi harga saham, semakin besar nilai perusahaan, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan yang telah go public atau tercatat di bursa efek, kesejahteraan pemegang saham tercermin melalui kenaikan harga saham, yang dipengaruhi oleh keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen (Ningrum, 2022).

Nilai perusahaan dapat dinilai melalui berbagai indikator, salah satunya adalah harga pasar saham. Harga pasar saham yang terbentuk dari transaksi antara pembeli dan penjual mencerminkan nilai pasar perusahaan, karena harga saham dipandang sebagai representasi dari nilai aset perusahaan yang sebenarnya. Dengan demikian, upaya untuk memaksimalkan nilai pasar perusahaan berarti juga memaksimalkan harga pasar saham. Semakin tinggi harga saham, semakin besar pula nilai perusahaan (Surya Abbas & Dillah, 2020). Harga pasar saham perusahaan yang semakin tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar

deviden kepada para investornya, hal tersebut merupakan tujuan pokok yang ingin dicapai perusahaan yaitu meningkatkan kemakmuran bagi investor atau pemegang saham serta semua *stakeholder* dalam perusahaan.

Weston & Copeland dalam buku Silvia Indriyani menerangkan bahwa pengukuran nilai perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio pasar (Adfentari, IfiSumiati & Fauzi, 2020). Rasio pasar merupakan suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai kepada investor atau para pemegang saham. Rasio pasar atau rasio penilaian merupakan gambaran menyeluruh bagaimana investor menilai sebuah perusahaan sehingga tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya. Rasio pasar atau rasio penilaian terdiri dari *Price to Book Value (PBV)*, *Price Earning Ratio (PER)*, dan *Tobin's Q*. *Price to Book Value (PBV)* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar harga saham yang ada dipasar dibandingkan dengan nilai buku dari saham sehingga semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan bahwa pasar percaya pada prospek kedepan perusahaan tersebut (Himawan, 2020). *Price Earning Ratio (PER)* yaitu harga yang harus dibayar oleh pembeli jika perusahaann tersebut dijual. Terakhir adalah *Tobin's Q* yaitu nilai perusahaan yang didapatkan dari hasil perbandingan antara nilai pasar yang terdaftar di pasar saham dengan nilai penggantian aset perusahaan (*asset replacement value*).

Harga saham perusahaan sempat terpengaruh karena adanya Pandemi Covid-19 seperti yang dialami oleh perusahaan-perusahaan infrastruktur yang mengalami keterlambatan bahkan penghentian sejumlah proyek. Salah satu contoh proyek yang ditunda karena Pandemi Covid-19 adalah pembangunan jalan Aek Natolu – Ajibata,

pengembangan food Estate Kalimantan Tengah, serta Akses Bandara Baru Syamsuddin Noor. Selain diakibatkan oleh fenomena Covid-19 namun juga diakibatkan karena pertimbangan kriteria readiness (usulan pembangunan) yang juga belum siap (Bappeda.kaltimprov.go.id/, 2022). Berikut ini adalah harga saham beberapa perusahaan infrastruktur sebelum dan sesudah pandemi Covid 19.

Tabel 1.1
Daftar Harga Saham Perusahaan Infrastruktur

No	Kode Perusahaan	Harga Saham (per 1 Juli)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	WIKA	1.320	2.450	1.165	995	950
2	JSMR	4.190	5.900	4.400	3.540	3.500
3	ADHI	1.542	1.625	605	755	755
4	LINK	4.350	4.250	2.180	4.350	4.670
5	PORT	600	535	440	710	545
6	GMFI	284	212	84	90	79
7	PTPP	2.030	2.210	880	920	930
8	TLKM	3.750	4.220	3.040	3.110	4.020
9	IBST	7.300	8.300	8.200	6.225	9.650
10	FREN	71,72	318	97	118	82

Sumber: <https://finance.yahoo.com/>

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa harga saham perusahaan infrastruktur sebelum pandemi Covid 19 cenderung lebih tinggi dan menurun sejak tahun 2020. Dari 10 perusahaan infrastruktur di atas, seluruhnya mengalami penurunan harga saham dari tahun 2019 ke 2020, bahkan penurunan terus berlanjut hingga tahun 2022 seperti pada WIKA, JSMR, dan IBST. Sedangkan perusahaan lain mampu memulihkan diri pasca pandemi terlihat dari mulai meningkatnya harga saham di tahun 2021 seperti pada ADHI, LINK, PORT, GMFI, PTPP, TLKM, dan FREN.

Harga saham yang mencerminkan nilai perusahaan infrastruktur tersebut tidak terlepas dari adanya peran *Good Corporate Governance* karena perusahaan

yang berkembang dengan baik adalah perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik untuk mengatur hubungan antara pemegang saham atau investor dengan seluruh *stakeholders* dalam perusahaan. *Good Corporate Governance* menjadi salah satu faktor non financial yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Darniaty, 2022). Perusahaan yang meningkatkan nilai perusahaan dengan menggunakan *good corporate governance* pada dasarnya bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik antara principal dan agent dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut nyatanya tidak mudah bagi perusahaan. Permasalahan *good corporate governance* yang terjadi pada perusahaan infrastruktur dan menyita perhatian publik ditahun 2023 yaitu kasus korupsi terkait penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020 oleh Direktur Utama PT. Waskita Karya yang mencairkan uang menggunakan dokumen palsu untuk membayar utang perusahaan di proyek-proyek fiktif sehingga kerugian negara mencapai kasus ini sebesar Rp 2.546.645.987.644 (<https://news.detik.com>). Kasus ini mencerminkan bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* belum tercapai secara optimal.

Aspek atau mekanisme *Good Corporate Governance* yang berperan penting antara lain struktur kepemilikan baik kepemilikan institusional maupun kepemilikan manajerial dan komite audit, dewan komisari independent, komite audit, dan kualitas audit (Nafiah & Sopi, 2020). Aspek-aspek Good Corporate Governance memiliki peran penting sesuai dengan teori keagenan, di mana

kepemilikan manajerial berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sementara kepemilikan institusional bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap setiap keputusan manajemen. Komisaris independen adalah pihak yang tidak terlibat dalam manajemen, bukan pemegang saham mayoritas, pejabat, atau tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas, yang berperan dalam mengawasi pengelolaan perusahaan. Komite audit bertugas memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku serta mengawasi konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan dan menurunkan nilainya.

Pertama, kepemilikan institusional menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai bagaimana good corporate governance memengaruhi nilai perusahaan. Kepemilikan institusional merujuk pada saham yang dimiliki oleh institusi lain di luar perusahaan, seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, dan lembaga lainnya. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin efisien penggunaan aset perusahaan, serta diharapkan mampu mencegah pemborosan dan manipulasi laba oleh manajemen, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (Sugiarti et al., 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur, di mana peningkatan kepemilikan institusional sejalan dengan kenaikan nilai perusahaan (Sugiarti et al., 2023). Namun, temuan lain menunjukkan hasil yang berbeda, yakni kepemilikan institusional tidak memiliki dampak signifikan terhadap nilai perusahaan karena

pihak institusional dinilai kurang mampu mengawasi manajemen perusahaan secara efektif (Aulia, 2022).

Kedua, Kepemilikan manajerial ditunjukkan oleh persentase saham yang dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi, yang diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Salah satu mekanisme untuk mengatasi konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan internal (insider ownership), yang dapat menyelaraskan kepentingan antara pemilik dan manajer (Riyanti & Munawaroh, 2021). Semakin banyak saham yang dimiliki manajer melalui kepemilikan manajerial, semakin besar motivasi mereka untuk meningkatkan kinerja karena mereka memiliki peran sebagai pengambil keputusan dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kinerja manajemen dan berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan.

Adanya pengaruh positif signifikan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan telah banyak dibuktikan sebelumnya (Fadelia & Diyanti, 2023), (Ningsih et al., 2023), ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka akan membuat nilai perusahaan semakin meningkat. Namun temuan berbeda yaitu kepemilikan manajerial tidak mampu mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan (Widyastuti et al., 2022).

Ketiga, dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari manajemen, bukan pemegang saham mayoritas, pejabat, atau pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan, dan bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, semakin baik fungsi

pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan, karena keberadaan komisaris independen dapat mengurangi potensi konflik internal. Mereka diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, serta pemegang saham publik.

Peneliti sebelumnya menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Mirnayanti & Rahmawati, 2022); (Sugiarti et al., 2023), ini menunjukkan bahwa semakin banyak komisaris independent akan mengurangi konflik agensi sehingga perusahaan dapat lebih berfokus dalam meningkatkan nilai perusahaan. Berbeda dengan peneliti lain yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Amaliyah & Herwiyanti, 2020).

Keempat, komite audit merupakan organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dan dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit dibentuk dalam rangka mengoptimalkan kinerja dewan komisaris. Dengan adanya pengawasan yang optimal dari dewan komisaris akan membantu mengelola perusahaan dengan efisien dan efektif sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, komite audit memiliki peran yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance*.

Peneliti sebelumnya menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Firdarini, 2023). Adanya pengaruh positif ini menunjukkan bahwa keefektifitasan fungsi komite audit berakibat terhadap berjalannya fungsi, pengawasan terhadap perusahaan sehingga dapat mencegah

konflik keagenan, dan meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi peneliti lain memiliki temuan berbeda yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Mirnayanti & Rahmawati, 2022); (Irmalasari et al., 2022)

Faktor non-keuangan yang juga mempengaruhi nilai perusahaan disamping *Good Corporate Governance* adalah pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial yang terdampak oleh aktivitas perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). *Corporate Social Responsibility* merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan atau unit bisnis dalam memberikan kontribusinya dalam melakukan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan mementingkan tingkat keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Irmalasari et al., 2022).

Corporate Social Responsibility memiliki dampak yang cukup berpengaruh terhadap perubahan nilai perusahaan, namun sayangnya hal tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia terlebih bagi perusahaan yang sudah *go public*. Pemerintah sendiri telah mengatur pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdampak operasi perusahaan dalam laporan keuangan tahunan, namun sayangnya poin-poin *Corporate Social Responsibility* yang dilaporkan oleh perusahaan merupakan informasi yang masih bersifat sukarela. Berikut ini adalah contoh-contoh perusahaan infrastruktur yang melakukan dan tidak pengungkapan CSR.

Tabel 1.2
Daftar Perusahaan Infrastruktur yang Mengungkapkan dan Tidak Mengungkapkan CSR

Lingkup Perusahaan Infrastruktur	No	Nama Perusahaan	Keterangan Pengungkapan CSR	
			Ya	Tidak
Transport Infrastructure Operator	1	PT. Cardig Aero Services Tbk		√
	2	PT. Nusantara Pelabuhan Handal Tbk	√	
Heavy Constructions & Civil Engineering	3	PT. Surya Semsta Internusa Tbk	√	
	4	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	√	
	5	PT. Pembangunan Perumahan	√	
	6	PT. Bukaka Teknik Utama Tbk		√
	7	PT. PP Presisi Tbk		√
	8	PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk		√
Wireless Telecommunication Services	9	PT. Smartfren Telecom Tbk	√	
	10	PT. Tower Bersama Infrastruktur	√	
	11	PT. Bakrie Telecom Tbk		√
Electric Utilities	12	PT. Pertamina Geothermal Energy	√	
	13	PT. Cikarang Listrindo Tbk	√	
	14	PT. Leyand International Tbk		√
Gas Utilities	15	PT. Himalaya Energy Perkasa Tbk		√

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak seluruh perusahaan infrastruktur melaporkan CSR (*Substantybility Report*). Dari 15 perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI terdapat 8 perusahaan yang mengungkapkan CSR sedangkan 7 perusahaan tidak membuat laporan CSR. Perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan CSR tersebut dikarenakan informasi yang ada dalam laporan CSR masih bersifat sukarela.

Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap lingkungan yang terdampak aktivitas perusahaan. Perusahaan yang sudah *go public* tentunya harus berpegang pada prinsip transparansi kepada

seluruh elemen yang terlibat oleh operasi perusahaan. Perusahaan dapat dianggap transparan jika dapat melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dampak pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keyakinan masyarakat pada perusahaan yang dibangun di lingkungan mereka sehingga perusahaan terhindar dari reputasi negatif (Aulia, 2022). Dengan reputasi yang bagus di mata masyarakat maka hal tersebut dapat menarik investor untuk melakukan investasi pada perusahaan.

Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Peneliti terdahulu menemukan adanya pengaruh positif *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan (Aulia, 2022). Akan tetapi terdapat pula penelitian yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan (Irmalasari et al., 2022). Ketidakkonsistenan hasil tersebut terjadi karena masih banyak perusahaan yang tidak konsisten atau bahkan belum menyertakan pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan, atau mungkin poin tanggung jawab sosial perusahaan yang disampaikan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan kejadian di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengukuran *good corporate governance* dapat dilakukan dengan empat aspek yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit. Akan tetapi hasil penelitian terdahulu masih terdapat *research gap* pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan sehingga penting untuk

dilakukan penelitian kembali dengan aspek yang sama pada jenis industri yang berbeda (industri infrastruktur) agar diperoleh hasil secara konsisten. *Fenomena gap* yang terjadi pada perusahaan-perusahaan infrastruktur yaitu banyak perusahaan yang mengalami pailit atau kebangkrutan sehingga terancam *de-listing* atau penghapusan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) serta kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan infrastruktur akan memberikan dampak pada nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Sosial Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan” (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan perusahaan Infrastruktur mengalami kerugian yang menyebabkan terhambatnya bahkan terhentinya proyek-proyek.
2. Nilai saham beberapa perusahaan infrastruktur cenderung menurun seperti perusahaan Waskita Karya (WSKT), turun -3,97%, Waskita Beton Precast (WSBP) turun hingga -3,64%, lalu Wijaya Karya (WIKA) turun sebesar -1,77%, Adhi Karya (ADHI) yang turun sebesar -1,69%.
3. Belum meratanya penerapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang dilakukan Indonesia, meskipun kebanyakan perusahaan Swasta masih cukup mendominasi dalam penerapan CSR di Indonesia.

4. Adanya kasus Direktur Utama PT. Waskita Karya yang mencairkan uang menggunakan dokumen palsu untuk membayar utang perusahaan di proyek-proyek fiktif sehingga menimbulkan kerugian bagi negara dan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka akan dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai:

1. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan masalah yang diteliti, dan hasilnya akan disusun dalam bentuk skripsi atau tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana di Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung..

1.4.2 Tujuan Penelitian

Dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan:

1. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri khususnya wawasan dalam ruang lingkup *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana yang bertempat di Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Bandung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai berikut:

1. Institusi Akademik: Menambah pemahaman ilmiah tentang hubungan antara *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* dengan Nilai Perusahaan dalam konteks Industri Infrastruktur.
2. Perusahaan di Sektor Infrastruktur: Memberikan panduan tentang bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dan praktik *Corporate Social Responsibility* yang dapat meningkatkan Nilai Perusahaan.
3. Masyarakat: Meningkatkan transparansi dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Serta masyarakat memahami apa saja hak yang seharusnya mereka dapatkan jika terdampak oleh operasi perusahaan.
4. Investor: Membantu investor dalam membuat keputusan investasi pada perusahaan yang akuntabel dan transparan dalam menjalankan operasinya secara berkelanjutan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

1.6.1.1 Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menurut Jensen, hubungan agensi muncul ketika satu pihak atau lebih (prinsipal) memperkerjakan pihak lain (agen) untuk melakukan suatu layanan serta mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Prinsipal merujuk pada

pemilik saham atau investor, sementara agen adalah pihak manajemen yang menjalankan perusahaan. Hubungan agensi ini berfokus pada pemisahan antara kepemilikan oleh investor dan pengendalian oleh manajemen. Pemisahan ini berpotensi menimbulkan konflik antara pemilik dan manajemen, yang dikenal sebagai konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena manajemen mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik, sehingga menimbulkan biaya keagenan, yaitu biaya yang dikeluarkan pemilik untuk mengawasi tindakan manajemen. Ketidaksesuaian antara keputusan manajemen dan keputusan yang mendukung kesejahteraan pemilik dapat menyebabkan kerugian bagi prinsipal, dan kerugian ini disebut sebagai residual loss (Purba, 2023).

Pada penelitian ini, teori keagenan sangat relevan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Beberapa variabel yang sejalan dengan teori ini antara lain adalah kepemilikan manajerial, yang berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, serta kepemilikan institusional yang berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan manajemen. Selain itu, komisaris independen adalah komisaris yang tidak terlibat dalam manajemen, bukan pemegang saham mayoritas, pejabat, atau memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas, dan bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan. Komite audit memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta melakukan pengawasan efektif terhadap potensi konflik kepentingan yang bisa merugikan perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan. Dengan demikian, variabel-variabel yang diteliti memiliki landasan teori yang kuat.

1.6.1.2 Teori Sinyal

Teori sinyal (Signalling Theory) pertama kali diperkenalkan oleh Spence pada tahun 1973, yang menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi (pengirim) memberikan sinyal atau isyarat berupa informasi yang mencerminkan kondisi perusahaan, yang berguna bagi pihak penerima, dalam hal ini investor. Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ross pada tahun 1977, yang menekankan adanya asimetri informasi antara manajemen yang lebih memahami kondisi perusahaan (well-informed) dan pemegang saham yang kurang mengetahui (poorly informed). Eksekutif perusahaan, dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang perusahaannya, terdorong untuk memberikan informasi ini kepada calon investor agar harga saham perusahaan mereka naik (Purba, 2023).

Informasi yang diterima investor dapat berupa sinyal positif (good news) atau sinyal negatif (bad news). Sinyal positif terjadi ketika laba perusahaan yang dilaporkan meningkat, sedangkan sinyal negatif muncul jika laba yang dilaporkan mengalami penurunan, yang merupakan indikasi buruk bagi investor. Oleh karena itu, informasi menjadi elemen penting bagi investor atau pelaku bisnis, karena informasi memberikan gambaran, catatan, atau keterangan mengenai kondisi perusahaan, baik di masa lalu, saat ini, maupun prospek masa depan yang mempengaruhi kelangsungan usahanya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh investor di pasar modal sebagai alat untuk menganalisis dan membuat keputusan investasi.

Teori sinyal pada penelitian ini dapat menjelaskan hubungan CSR terhadap nilai perusahaan. Teori sinyal menjelaskan bagaimana perusahaan dapat

mengkomunikasikan informasi positif kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam hal ini, CSR berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi nilai perusahaan di mata investor.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, untuk itu perlu adanya ulasan singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu sehingga mengetahui hasil dari penelitian terdahulu.

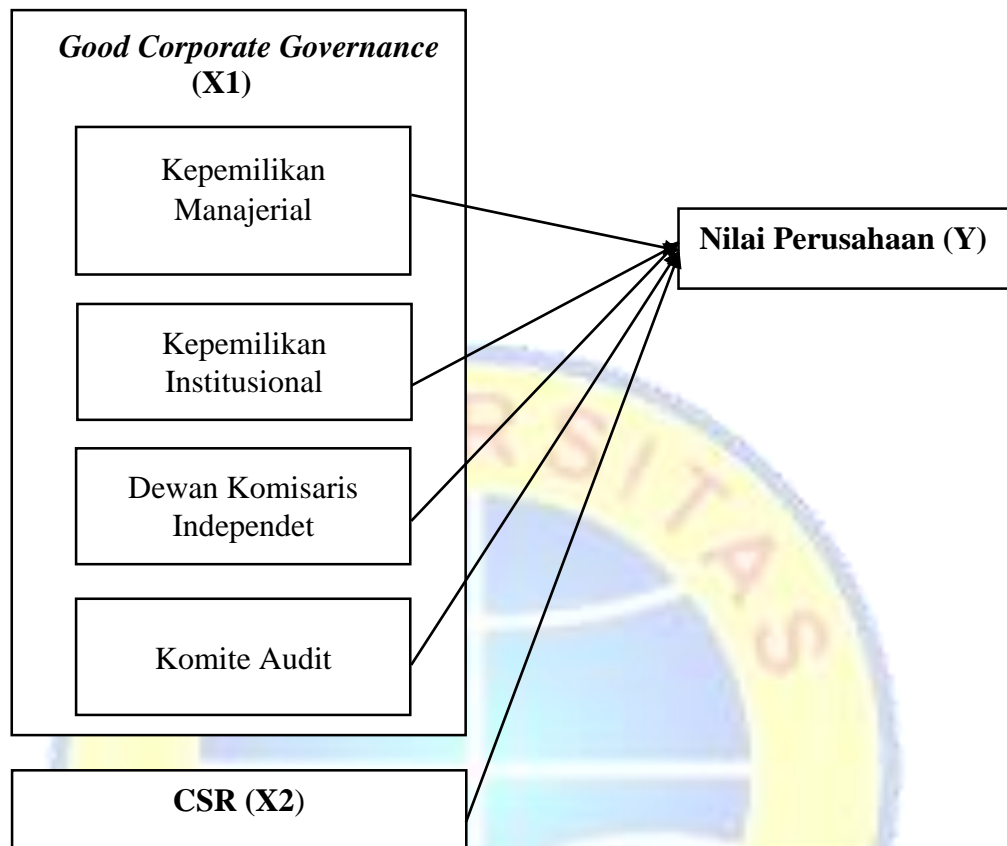
Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Irmalasari et al., 2022)	Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 3. Komite audit, csr, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.
2.	(Riyanti & Munawaroh, 2021)	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 3. Komisaris independent berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
3.	(Darniaty, 2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. GCG berpengaruh signifikan negatif terhadap performa keuangan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Nilai Perusahaan Dengan Performa Keuangan Sebagai Variabel Mediasi	<ol style="list-style-type: none"> 2. GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 3. Performa keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan 4. Performa keuangan mampu memediasi pengaruh penerapan <i>good corporate governance</i> terhadap nilai perusahaan.
4.	(Sugiarti et al., 2023)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 3. Komisaris independent berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
5.	(Sulbahri, 2021)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Nilai Perusahaan	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

1.6.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

1.6.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian, sehingga rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Disebut sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan, belum pada fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 – 2022.

2. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 – 2022.
3. *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 – 2022.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pada Perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 – 2022.

